

BAB II

PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN KEBIJAKAN LOOK EAST

INDIA SERTA ACT EAST

Bab ini akan menjelaskan secara umum bagaimana perkembangan Kebijakan Look East dan Act East, bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan tersebut bagi India dan juga dampak serta tantangan dari Act East di masa depan. Dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di India dari tahun 1990-an membawa kebijakan luar negeri baru yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara menjalin kerja sama dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian pemimpin, Perdana Menteri Narendra Modi menetapkan kebijakan luar negeri baru yaitu Act East yang merupakan evolusi dari kebijakan sebelumnya yaitu Look East.

2.1 Kebijakan Look East

2.1.1 Perkembangan Kebijakan Look East India

Kebijakan Look East India dimulai di bawah pemerintahan Narasihma Rao pada awal tahun 1990-an di tengah situasi politik domestik India yang tidak stabil. Kebijakan ini muncul sebagai pendorong utama kebijakan luar negeri India pada periode pasca perang dingin terutama untuk memperbaharui kontak politik, meningkatkan integrasi ekonomi dan menjalin kerja sama keamanan dengan beberapa negara Asia Tenggara sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman politik. Ketegangan geopolitik yang terjadi di akhir masa perang dingin yang mengarah juga pada terjadinya perang teluk pada 1991 sangat mempengaruhi perekonomian India hingga membawa India dalam resesi ekonomi dan krisis neraca pembayaran yang akut pada pertengahan tahun 1991 (Haokip, 2010). Krisis ini mendorong India untuk mencari peluang ekonomi di bagian Asia yang lebih menguntungkan.

Selain itu, kebijakan Look East ini juga didorong oleh tiga faktor spesifik. Pertama, runtuhnya Uni Soviet menciptakan kekosongan strategis dan ekonomi bagi India, dan berakhirnya bipolaritas Amerika Serikat-Uni Soviet akibat berakhirnya perang dingin yang berdampak pada mengurangnya relevansi sikap non-blok India. Kedua, munculnya China sebagai kekuatan baru yang mendorong India untuk menjangkau Asia Tenggara untuk menghindari hegemoni China sehingga India berusaha lebih aktif dalam melancarkan kegiatan politik dan ekonominya di Kawasan tersebut, Kekuatan ekonomi dan militer China naik secara signifikan serta liberalisasi ekonomi China yang sedang pada puncaknya membuat India harus mendorong dirinya sendiri menuju Kawasan ini. India juga didorong keinginan untuk mengembangkan dan menstabilkan negara-negara bagian timur lautnya yang cenderung rapuh karena beberapa konflik dan pemberontakan yang terjadi. Hal ini dikarenakan wilayah India bagian timur laut berbatasan langsung dengan Myanmar sehingga sangat krusial bagi India untuk menjaga konektivitas darat dengan wilayah Asia Tenggara (Bhaumik, 2014). Ketika faktor-faktor ini digabungkan dengan Krisis Teluk, maka India harus menempatkan kebutuhan untuk mendiversifikasikan sumber energi dan kemitraan ekonominya menjadi lebih luas. India perlu berintegrasi ke dalam ekonomi global, dan dinamisme tetangga timur India menjadikan Asia Tenggara menjadi tempat yang tepat.

Kebijakan Look East merupakan hasil dari kondisi ekonomi dan politik India hampir bangkrut. Hal ini terjadi Ketika India mengalami krisis neraca pembayaran. Ketika pemerintahan Narasimha Rao mulai menjabat, cadangan devisa India berada di titik terendah dan Reserve Bank of India juga berjuang untuk memastikan bahwa India tidak goyah dalam pembayaran pinjaman. Pemerintahan Chandra Shekhar sebelumnya telah meminjam dari IMF dan adanya tanggungan persyaratan yang harus dipenuhi karena pemerintahan Rao juga membutuhkan banyak dukungan berupa pinjaman dari IMF (Grare & Mattoo, 2004). Dorongan untuk memperdalam globalisasi secara bertahap membebani kondisi domestik ekonomi di

India. Kebijakan tersebut dimulai pada periode pasca kemerdekaan dengan proses pembangunan bangsa yang lebih mengandalkan intervensi negara dan perencanaan pusat. Tetapi pada akhir 1980-an, hasil dari kebijakan dan kekurangan pembangunan yang dipimpin negara tersebut cenderung sangat lambat dan diperburuk dengan cadangan devisa yang habis, situasi minyak bumi serta Perang Teluk (Menon & Nigam, 2007). Semua faktor ini menyebabkan defisit neraca pembayaran yang besar dengan India terpaksa melakukan penyesuaian struktural dengan merangkul peran pasar untuk menanggapi tekanan ini, Perdana Menteri Rao dan Menteri Keuangan, Dr. Manmoham Singh, mempercepat dan memperluas proses reformasi ekonomi dan liberalisasi dengan pengumuman kebijakan ekonomi baru pada tahun 1991. Hal ini dilakukan untuk menghadapi resistensi institusional yang parah dan tekanan politik internal dari partai yang berkuasa (Palakumathu G, 2013). Sesuai dengan kebijakan ini, India meluncurkan kampanye sistematis untuk memobilisasi investasi dan membuka India kepada dunia dalam hal perdagangan, investasi, teknologi, dan bidang pertumbuhan ekonomi lainnya.

Sementara itu di Asia Timur dan Tenggara muncul negara-negara yang secara signifikan menjadi peringkat teratas ekonomi global pasca perang sehingga India melihat bahwa kawasan ini dapat menjadi mitra yang layak untuk diajak berkolaborasi. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet dan tekanan globalisasi Barat melalui pendekatan kebijakan neoliberalnya terhadap model pertumbuhan perdagangan yang dipromosikan lembaga-lembaga besar seperti World Bank, India terpaksa membuka ekonominya secara bertahap. India harus menemukan strategi geo-ekonomi baru dengan mitra baru di Asia Timur dan Tenggara yang sedang berkembang pesat (Leonard, 2015). Liberalisasi kebijakan akan mengundang investasi asing langsung dan mendorong ekspor di India sehingga dapat menyelamatkan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Selain mendorong perekonomian di bagian Timur Laut India, daerah atau negara bagian di India seperti wilayah Barat, Selatan dan beberapa bagian negara bagian utara India

yang memiliki pemerintahan stabil (Bhaumik, 2014), kebijakan pajak yang wajar dan infrastruktur yang baik memanfaatkan dan menambah baik produk dalam wilayah masing-masing karena wilayah tersebut menjadi penerima manfaat besar dari negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Di luar Asia Selatan, India melihat Asia Tenggara sebagai satu-satunya kawasan dimana kondisi politik dan ekonominya menawarkan peluang bagi India sendiri. Kebijakan Look East India ditujukan untuk penyelarasan ekonomi yang lebih besar dan peningkatan peran politik di Kawasan Asia-Pasifik yang dinamis dan Asia Tenggara menjadi wilayah yang spesifik untuk tujuan ini. Kebijakan Look East diupayakan untuk menjadikan India sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wacana strategis Asia-Pasifik. Oleh karena itu, fase kebijakan Look East ini menandai awal dari hubungan yang dinamis di bidang ekonomi, politik dan strategis. Potensi ekonomi dari kebijakan ini juga sangat ditekankan untuk dikaitkan dengan kepentingan ekonomi Kawasan Timur Laut India secara keseluruhan.

Pada awal tahun 1990-an ini terjadi transformasi ekonomi politik internasional akibat dari berakhirnya perang dingin dan penyebaran globalisasi masif setelahnya. Globalisasi ekonomi dunia mendorong persaingan internasional dan telah melahirkan era baru dalam regionalism. Sebagai respons dalam dunia yang bertransformasi dengan cepat, sebagian besar negara di penjuru dunia membentuk diri mereka menjadi kawasan yang memberikan dorongan baru bagi berbagai usaha mereka berdasarkan konsep regionalism. Kedekatan geografis, komplementaritas ekonomi, komitmen politik, koordinasi kebijakan, dan pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang mendorong negara melakukan regionisme.

Selama ini selayaknya negara berkembang lain, India menghadapi banyak tantangan baik secara internal maupun global. Secara internal India sedang menghadapi kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik serta kinerja ekonomi yang buruk. Setelah pecahnya Uni Soviet, India

kehilangan mitra ekonomi utama dan sekutu strategisnya. India menjadi sadar akan tren yang berkembang menuju arah regionalism dan juga diiringi dengan rasa takut akan ketertinggalan dari perekonomian global. India menekankan pada menjalin ikatan kerja sama yang tahan lama dengan berbagai negara. Kerja sama regional pertama yang diikuti India di kawasannya sendiri adalah SAARC atau South Asian Association for Regional Cooperation yang merupakan organisasi beranggotakan negara-negara Asia Selatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah kerja sama ekonomi yang didasarkan pada semangat persaudaraan. Namun hal ini justru menjadi pemicu ketegangan politik antara India dan Pakistan. India juga tidak melihat ke arah Asia Barat dan Afrika sebagai Kawasan untuk kerja sama ekonomi yang intensif karena negara-negara di Kawasan ini cenderung melihat atau berafiliasi ke arah Barat.

Selama kurun waktu pasca perang dingin India telah tertarik pada peluang ekonomi yang memiliki peluang tinggi di Asia Timur. Dipaksa oleh krisis ekonomi dan kebutuhan mendesak dari Invertasi Asing Langsung untuk pembangunan ekonomi yang cepat, India baru mengumumkan kebijakan Look East pada tahun 1991 dan bertekad untuk bekerja dengan semangat kerja sama ekonomi regional dengan tetangga di wilayah Timurnya. Kebijakan tersebut membuktikan dorongan baru terhadap perspektif Kerja sama dan pembangunan Asaua yang dilakukan selama era Nehruvian. Fase pertama dari kebijakan Look East India berpusat pada ASEAN, dan berfokus terutama pada hubungan perdagangan dan investasi. Pada tahap kedua yang dimulai tahun 2003, cakupan dari kebijakan Look East menjadi lebih komprehensif, mulai dari Australia hingga Asia Timur dengan ASEAN sebagai pusatnya. Fase baru ini menandai pergeseran focus dari perdangan ke kerja sama ekonomi dan keamanan ke ruang lingkup yang lebih luas, kemitraan politik, konektivitas fisik melalui jalan raya dan jalur kereta api dan berbagai upaya lainnya guna memperkuat hubungan kerja sama dan memaksimalkan keuntungan.

Dalam upaya India untuk melihat ke Timur, wilayah Timur Laut telah menjadi wilayah yang signifikan karena kedekatan geografisnya dengan Asia Tenggara dan China. Pencarian India dalam hubungan ekonomi baru dengan Asia Tenggara sekarang didorong oleh kebutuhan domestik untuk mengembangkan Kawasan Timur Laut dengan meningkatkan konektivitasnya ke dunia luar. Alih-Alih mencoba mengisolasi Kawasan Timur Laut-nya dari pengaruh eksternal seperti yang dilakukan di masa lalu, India kini menyadari akan pentingnya membuka hubungan komersial dengan Asia Tenggara. Dalam upayanya untuk melihat ke Timur, India memiliki visi Timur Laut sebagai pintu gerbang ke Timur dan batu loncatan untuk meluncurkan integrasi ekonomi yang jauh lebih intens dengan Asia Tenggara.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Look East

Keinginan akan reformasi ekonomi, ditambah dengan kekuatan globalisasi dan juga frustrasi akan proses integrasi di Asia Selatan serta munculnya China sebagai kekuatan baru di Asia yang berdampak pada keamanan India membuat India membuka diri ke pasar dunia dan mengikuti tren regionalisme dengan meluncurkan kebijakan Look East pada tahun 1991 (Haokip, 2010). Dengan demikian, kebijakan Look East merupakan produk dari berbagai persepsi, harapan, serta paksaan dari India dalam lingkungan internasional yang berubah. Hal ini merupakan bagian dari politik baru yang dapat dilihat dari dalam kebijakan ekonomi luar negeri India. Ketertarikan untuk kerja sama regional dengan ASEAN ini didasarkan pada pengakuan akan pentingnya strategis dan ekonomi Asia Tenggara bagi kepentingan nasional India.

Demi mencapai tujuan kebijakan Look East, India berusaha secara maksimal mengejar program kerja sama terstruktur dengan negara-negara Asia Tenggara. Pengejaran keanggotaan dalam blok perdagangan regional, terlepas dari komitmennya terhadap multilateralisme, menunjukkan kenyataan bahwa sebagian besar ekonomi perdagangan utama adalah anggota blok perdagangan, seperti UE, NAFTA, dan ASEAN. Tren ini telah membuat India menyadari

bahwa stimulus untuk pertumbuhan Asia di masa depan akan semakin berpengaruh terhadap kawasan. Mempertimbangkan luasnya integrasi regional di seluruh dunia, Asia Selatan dianggap tidak terintegrasi. Lambatnya kemajuan Kerja sama regional di Asia Selatan, khususnya ketidakmampuan SAARC untuk memperluas hubungan ekonomi di kawasan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh sifat keras Pakistan dan keengganan untuk mengikuti aturan permainan global dalam perdagangan dan juga memaksa India untuk “melihat ke Timur” untuk mencari lebih banyak peluang perdagangan (Baru, 2001).

2.1.3 Kerja sama Ekonomi dengan ASEAN

Sejak dimulainya kebijakan Look East pada tahun 1991, hubungan bilateral antara India dan ASEAN telah berkembang pesat. Hubungan India dengan ASEAN ditingkatkan menjadi Kemitraan Dialog Sektoral pada Maret 1993 di tiga bidang meliputi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Pada Maret 1993 para pejabat India dan ASEAN bertemu di New Delhi untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama tertentu dalam sektor-sektor yang dirancang berupa program yang berkelanjutan sehingga hubungan India-ASEAN ditingkatkan menjadi Kemitraan Dialog Penuh pada KTT ASEAN kelima di Bangkok pada Desember 1995. Hal ini meningkatkan interaksi antara ASEAN dan India dari pejabat senior ke tingkat Menteri dan memungkinkan partisipasi India dalam Konferensi Pasca-Kementerian ASEAN (Rao, 2011). Pada konferensi Pasca-Kementerian ASEAN di Jakarta, pada Juli 1996, para Menteri ASEAN dan India menguraikan visi dan misi bersama dan mengintensifkan kerja sama di semua bidang-bidang khusus untuk kerja sama seperti infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pariwisata. Perdana Menteri India I.K. Gujral mengatakan bahwa dia melihat status kemitraan dialog penuh India sebagai jendela bagi partisipasi progresif India dalam pengelompokan serupa ASEAN lainnya, seperti dengan APEC dan pertemuan Asia-Eropa (Gujral, 2014).

India dan ASEAN menjadi mitra yang alami dalam implementasi kebijakan Look East. Secara geografis, India dekat dengan Asia Tenggara dan berbagai perbatasan darat sepanjang 1.600 kilometer dengan Myanar dan berbatasan laut dengan Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. India dan beberapa negara anggota ASEAN telah menjalin hubungan dagang selama lebih dari seribu tahun dan saling mempengaruhi secara mendalam dalam bahasa, agama, dan budaya (Asher & Sen, 2001). Wilayah ini telah menjadi tujuan para imigran India selama berabad-abad. Terlepas dari kedekatan geografis dan keberadaan populasi asal India yang besar, pasar ASEAN yang berkembang pesat, keterbukaan mereka yang lebih besar dan peran yang lebih besar di pasar global memberikan alasan India untuk mengintegrasikan ekonominya dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara sejak awal 1990-an.

Kerja sama yang semakin erat antara India dan ASEAN menyebabkan penguatan tidak hanya dalam hubungan ekonomi, namun juga hubungan keamanan yang mengakibatkan masuknya India dalam ASEAN Regional Forum (ARF) pada tahun 1996. ARF merupakan forum utama untuk kerja sama keamanan di Kawasan Asia Pasifik, yang membahas masalah keamanan global dan regional serta pelucutan senjata dan masalah proliferasi. Masuknya India ke ARF menandakan penerimaan peran dan posisinya di Kawasan Asia-Pasifik.

Meningkatnya keterlibatan India dalam wacana strategis Kawasan Asia-Pasifik membuktikan komitmennya terhadap tujuan mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional. India telah menjadi peserta aktif dalam berbagai proses ARF dan telah menyelenggarakan acara ARF pertamanya pada 19-20 Oktober 2000 membahas mengenai pembajakan kebijakan anti pembajakan. Hubungan India-ASEAN ditingkatkan menjadi Kemitraan Tingkat KTT pada tahun 2002. Dengan demikian, India menjadi salah satu dari empat Mitra Tingkat KTT ASEAN bersama dengan Jepang, Korea, dan China. Pada KTT India-ASEAN yang kedua pada Oktober 2003, India dan ASEAN menandatangani perjanjian

kerangka kerja sama ekonomi komprehensif yang mengarah pada penciptaan Kawasan perdagangan bebas pada tahun 2011 dan persetujuan India terhadap perjanjian persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara. Selanjutnya India juga bekerja sama untuk memerangi terorisme internasional. Persetujuan India terhadap perjanjian persahabatan dan kerja sama ASEAN menunjukkan kedekatan yang berkembang dengan Asia Tenggara, tetapi yang lebih penting adalah perjanjian kerangka kerja yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas dalam 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja sama Ekonomi Komprehensif hingga pada akhirnya India menandatangani ASEAN-India Free Trade Agreement (FTA) dengan 10 anggota ASEAN pada Agustus 2009. Pada tahun 2003, cakupan kebijakan Look East India diperluas untuk mencakup negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan China.

Hubungan perdagangan dan investasi tetap menjadi elemen yang paling penting dalam langkah ini, dan perdagangan bilateral antara India dan negara-negara ini telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Sejak beralihnya aktivitas perdagangan internasional dari Atlantik ke Pasifik, India ingin menjalin hubungan erat dengan Kawasan. Menteri Luar Negeri India Yaswant Sinha merangkum kebijakan Look East India ketika pidato tentang kebangkitan India di Asia dengan mengatakan: “di masa lalu, keterlibatan India dengan Asia, termasuk Asia Tenggara dan Asia Timur, dibangun atas konsepsi idealis persaudaraan Asia, berdasarkan pengalaman pengalaman bersama terhadap kolonialisme dan ikatan budaya. Akan tetapi, saat ini ritme Kawasan ditentukan oleh perdagangan, investasi, dan produksi, serta sejaran dan budaya, Hal tersebut yang memobilisasi kebijakan Look East kami berusia satu dekade”(Sinha, 2003).

Kebijakan Look East telah melampaui tujuan awal India yang ingin memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan Asia Timur dan Tenggara. Dengan pertumbuhan

ekonomi India yang berkelanjutan, kebijakan tersebut sekarang memiliki agenda yang jauh lebih luas. Ketika kebijakan Look East diimplementasikan, empat tujuan besar telah dicapai dalam beberapa tahun sejak dimulai meliputi integrasi ekonomi regional, reformasi dan liberalisasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan di wilayah timur laut (Haokip, 2015). Dalam aspek integrasi ekonomi regional, Look East telah berhasil memperluas hubungan dengan tujuan untuk integrasi India kedalam proses regionalisasi ekonomi di Asia Timur dan Tenggara. Kebijakan Look East merupakan reaksi terhadap pembentukan kelompok ekonomi regional seperti NAFTA dan EU.

Di dunia yang semakin regional ini, diyakini bahwa pengelompokan India dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara akan meningkatkan posisinya dalam kaitannya dengan mitra regional lainnya. Melalui Kebijakan Look East India mengadopsi tiga cabang pendekatan untuk menjalin kerja sama meliputi memperbaharui kontak politik dengan negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan interaksi ekonomi dengan Asia Tenggara (investasi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata) dan mempererat hubungan pertahanan dengan beberapa negara di Kawasan ini sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman politik (G. V. C. Naidu, 2005).

India menjalin mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 1992 dan dalam waktu singkat hubungan India-ASEAN ditingkatkan menjadi kemitraan dialog penuh pada tahun 1995. Hubungan tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kemitraan tingkat puncak pada tahun 2002. Dengan demikian, dalam satu dekade, hubungan India dengan ASEAN semakin erat dan terstruktur dengan baik melalui mekanisme pertemuan tahunan tingkat tinggi. Akses India pada “Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia”, penandatanganan ASEAN-India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation pada tahun 2003 dan penandatanganan kesepakatan tentang “ASEAN-India Partnership for Peace, Progress, and

Shared Prosperity” di tahun 2004 telah menjadi landasan hubungan ASEAN-India. India siap untuk memainkan peran yang lebih besar dalam proses integrasi regional. Rincian spesifik Kerja sama ASEAN-India tercantum dalam rencana aksi pertama (2004-2010), dan kedua (2010-2015). Untuk memenuhi rencana ini, diperlukan pembagian dan pengelompokan dana seperti Dana Kerja sama ASEAN-India, Dana Sains dan Teknologi ASEAN-India, dan Dana Hijau ASEAN-India telah dirancang. Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA) telah ditandatangani pada 2009 dan mulai dioperasikan sejak 1 Januari 2010 dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan antara India dan negara-negara ASEAN.

Pada akhir dekade kedua, hubungan ASEAN-India ditingkatkan lebih lanjut menjadi kemitraan strategis pada tahun 2012 dengan tujuan yang memperluas ruang untuk kerja sama multifaset di semua bidang kepentingan antara ASEAN dan India. Dibentuknya ASEAN+1 yang menjadi sarana pertemuan tahunan tingkat tinggi antara ASEAN dan India, juga telah ditingkatkan menjadi konsultasi tingkat Menteri termasuk Menteri luar negeri, ekonomi, perdagangan dan industri, transportasi, energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, pertanian, lingkungan hidup, energi terbarukan, pariwisata dan usaha kecil-menengah. Hubungan ini sudah melalui berbagai kelompok kerja bersama seperti Komite Bersama di tingkat sekretariat, pejabat senior dan melalui interaksi di antara kepala institusi (Bashin, 2013).

2.1.4 Kerja sama Bilateral dengan Negara Asia Timur dan Tenggara

Selain Kerja sama regional dengan ASEAN, India juga memaksimalkan keuntungan dengan melibatkan negara-negara anggota ASEAN melalui mekanisme kerja sama bilateral. Sebagai contoh telah ditanda tangani Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) dengan Singapura pada tahun 2005 sebagai negara yang telah memfasilitasi konsolidasi hubungan India dengan ASEAN. Kemudian CECA ditandatangani dengan Indonesia dan

Malaysia pada tahun 2011. Demikian pula FTA ditandatangani dengan Thailand, Vietnam, dan Laos. Kedua perjanjian ini memberikan kerangka dasar untuk keterlibatan dan Kerja sama ekonomi bilateral. Berbagai mekanisme seperti pertemuan tingkat Menteri meliputi konsultasi kantor luar negeri, memorandum of understanding (MoU) di berbagai bidang komite bilateral, komisi Bersama, forum bersama, kelompok kerja Bersama di berbagai tingkat termasuk pejabat senior, sekretasi dan dialog sektoral tahunan dan dua tahunan membentuk struktur kerja sama bilateral yang lebih terpadu. Untuk mempromosikan Kerja sama bisnis ke arah bilateral, mekanisme seperti forum CEO dan forum bisnis telah dijalankan. Sementara hubungan bilateral telah ditingkatkan ke tingkat kemitraan strategis dengan Indonesia, Vietnam, dan Malaysia serta negara anggota ASEAN lain yang sedang di negosiasikan oleh India.

Selanjutnya dalam aspek reformasi dan liberalisasi, melalui kebijakan Look East India telah mereformasi dan meliberalisasi perdagangan dan investasi untuk menjalin ekonomi yang lebih intens dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara. Dengan demikian, India berusaha untuk menurunkan hambatan perdagangan dengan meliberalisasi rezim investasi. India telah menandatangani perjanjian kerangka kerja sama selama KTT Bali pada tahun 2003 untuk menciptakan Kawasan perdagangan dan investasi bebas dengan ASEAN pada tahun 2016. Sejak tahun 2003, India dan ASEAN telah menyetujui dan mengimplementasikan FTA. India telah menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif dengan Singapura pada tahun 2005. India juga telah menandatangani sejumlah perjanjian dengan Thailand dan Singapura (G. Naidu, 2013).

Setelah liberalisasi India, Look East juga memberikan alternatif pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan globalisasi dan kebangkitan Asia sebagai kekuatan ekonomi. Ketika ekonomi India mulai tumbuh pada secara signifikan pada akhir 1990-an, India semakin mengalihkan fokusnya ke pertumbuhan yang berkelanjutan. Hubungan ekonomi yang

kuat dengan Asia Timur dan Tenggara memposisikan India untuk ikut dalam pertumbuhan di Asia (Zhang, 2006). India juga mendorong investasi Asia Timur dan Tenggara di sektor transportasi, komunikasi, dan listrik untuk mengimbangi pertumbuhan ekonominya. India percaya bahwa Asia Timur memegang kunci bagi pertumbuhan ekonomi India yang berkelanjutan, khususnya ketika kegiatan ekonomi internasional menjadi lebih penting bagi pertumbuhan India sendiri. Aspek terakhir yang telah dicapai melalui kebijakan Look East adalah kebijakan ini berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan internal di India. Negara-negara bagian Timur Laut sebelumnya tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan kesenjangan ini telah bertambah parah sejak kemerdekaan India. Akibat ketimpangan ini seringkali terjadi kerusuhan di wilayah tersebut. Dengan diluncurkannya kebijakan Look East, India melihat Kawasan tersebut sebagai jalur masuk ke arah Timur dengan menghubungkan Kawasan Timur Laut dengan Asia Tenggara melalui jaringan-jaringan pipa, jalan raya, jalur kereta api dan jalur udara. Hal ini secara signifikan berdampak pada kehidupan di wilayah Timur laut dan juga melalui pembangunan ekonomi baik infrastruktur, komunikasi, perdagangan, investasi, logistik, dan kegiatan lainnya negara-negara bagian Timur Laut sangat mendukung kebijakan Look East.

2.1.5 Kebijakan Look East terhadap Kebangkitan China

Pada tahap ketiga keterlibatan India di Asia melalui kebijakan Look East diperluas mencakup tiga negara raksasa ekonomi di Asia yaitu Jepang, China, dan Korea. Melampaui dimensi ekonomi juga telah memasuki ranah yang lebih strategis. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke negara anggota ASEAN serta ke China, Jepang, dan Korea telah membantu menciptakan kemitraan strategis dengan negara-negara Kawasan. Kemampuan India di bidang militer, terutama dalam kekuatan Angkatan laut, telah berkembang secara signifikan sehingga memungkinkan negara tersebut untuk berkontribusi dalam peningkatan keamanan maritim di ruang Indo-Pasifik yang lebih luas. Doktrin keamanan India menganggap seluruh wilayah dari

Teluk Aden ke Selat Malaka dan seterusnya ke Laut China Selatan sebagai zona kepentingan keamanan langsung dan oleh karena itu setiap perumusan kebijakan harus mempertimbangkan aspek dasar tersebut. Muncul tantangan baru ketika isu kontroversial klaim antara China dan lima negara lain terhadap Laut China Selatan. Menanggapi isu ini India telah mengambil posisi dan menyatakan bahwa masalah tersebut harus ditangani di bawah payung hukum internasional yaitu UNCLOS, dan menyatakan bahwa kebebasan navigasi melalui perairan internasional dan ruang udara harus dihormati oleh semua pihak (Goshal, 2013).

Sudah tidak dapat diragukan lagi bahwa keterlibatan strategis Ini dipengaruhi oleh kondisi geopolitik di Kawasan Timur Laut, namun kebijakan interaksi intensif dengan negara-negara Timur ini tidak sepenuhnya efektif. Dengan latar belakang proposal AS tentang “Pivot to Asia” dan proyek China “One Belt One Road” dimana kedua kekuatan uaxtama di Kawasan itu bertujuan untuk memperkuat pengaruh masing-masing, India dengan kebijakan “Look East” yang berusia lebih dari dua dekade, berupaya membangun keamanan kooperatif, baik dari sisi strategis maupun sosial-ekonomi di lingkungan terdekatnya. India tidak mendukung aliansi atau pengelompokkan militer apapun. Dengan China, India percaya bahwa ada cukup ruang bagi kedua negara untuk mengagendakan kepentingan mereka tanpa ada konfrontasi antara kedua belah pihak. Terdapat konvergensi keamanan yang terlihat antara India dan Jepang serta negara-negara anggota ASEAN. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Abe, Jepang telah menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk mengambil peran yang lebih aktif sebagai penyedia keamanan ke negara-negara Asia Tenggara dan bahkan di luar Samudera Hindia. Sejalan dengan pergerakan Jepang, India melihat Jepang sebagai mitra yang berguna dan mencari cara untuk berkerja sama lebih aktif dengannya terutama di bidang maritim dan ekonomi. Tantangan strategis yang dihadapi India saat ini adalah bahwa kekuatan dan kepentingan AS secara bertahap menurun di Asia-Pasifik. Kehadiran militer Amerika Serikat di Kawasan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Inisiatif Kemitraan TransPasifik Amerika Serikat dipandang

menciptakan perpecahan di antara negara-negara ASEAN. Di sisi lain, proyek OBOR China dan jalur sutra maritim dipandang sebagai kebijakan yang dipersiapkan dengan baik untuk memperluas pengaruh China secara besar-besaran di Asia Tenggara dan Kawasan Samudra Hindia. Bagi India, peristiwa ini menyebabkan tantangan baru karena kehadiran China di dekat garis pantainya dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hal keamanan. Oleh karena itu, India perlu mempersiapkan diri secara militer, diplomatik, dan ekonomi. Namun, dalam menanggapi tantangan ini India sudah diuntungkan dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur yang memiliki masalah keamanan terutama perbedaan kekuatan dengan China bahkan sudah dibuktikan dengan konflik sengketa Laut China Selatan. Di Kawasan Samudera Hindia, negara-negara kepulauan mewaspadaai bahaya persaingan antara China dan AS. Oleh karena itu semua negara yang terlibat sebisa mungkin membangun pertahanan mereka. Dalam kondisi inilah India dapat memiliki peluang bagus untuk membantu dan memperkuat upaya mereka.

2.2 Kebijakan Act East

2.2.1 Latar Belakang Kebijakan Act East

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan peningkatan kebijakan Look East menjadi Act East pada pertemuan puncak India-ASEAN di Myanmar pada November 2014. Pernyataan resmi pertama dari perubahan kebijakan serta nomenklturnya muncul sekitar tiga bulan sebelum pengumuman perdana Menteri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj yang mengatakan bahwa sudah saatnya India tidak hanya “melihat ke Timur” dan saatnya untuk “bertindak ke Timur” (Swaraj, 2014). Segera setelah indikasi Swaraj tentang bertindak ke Timur di Vietnam, ungkapan tersebut disebutkan juga dalam pernyataan Bersama Indo-AS yang dikeluarkan pada kunjungan Perdana Menteri Modi ke AS. Sejak berkuasa pada tahun 2014, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi telah memberikan momentum yang lebih besar pada kebijakan Look East India dan mentransformasinya menjadi kebijakan Act

East. Kebijakan ini lebih dari sekadar rebranding (Rajendram, 2014). Perubahan kebijakan ini menunjukkan bahwa India semakin bersedia untuk memainkan peran strategis yang lebih aktif dan komprehensif dibuktikan dengan peningkatan diplomasi pertahanan di Asia Timur dan Tenggara. Pada awalnya pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Modi merujuk pada prioritas hubungan dalam Kawasan India dengan langkah Modi mengundang para pemimpin semua negara anggota Asosiasi Kerja sama Regional Asia Selatan, namun sebagai indikasi lebih lanjut baik Modi dan Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj melakukan kunjungan luar negeri ke negara-negara tetangga seperti Bhutan dan Bangladesh.

2.2.2 Implementasi Act East

Di bawah kebijakan Act East, India memfokuskan dan memperluas keterlibatannya di Kawasan Asia Pasifik. India dan negara-negara Kawasan Asia-Pasifik telah menjalin banyak Kerja sama mulai dari Latihan militer Bersama hingga kunjungan tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan meningkatnya kekuatan hubungan politik dan militer dengan negara-negara Asia-Pasifik. India mendapatkan dukungan dari AS dan beberapa negara di Kawasan tersebut dan kini memperluas kehadirannya di Laut China Selatan. Kawasan Asia-Pasifik menjadi memiliki kepentingan yang lebih strategis bagi masyarakat internasional, Sebagian disebabkan oleh kebangkitan China dan penyeimbangan Amerika Serikat di Asia (Fang, Tien-sze, 2016).

Dalam kaitannya dengan lingkup geografis, kebijakan Act East memiliki lingkup yang condong ke arah Asia-Pasifik. Lingkup ini dihasilkan dari visi India yang ingin menjadi lebih terintegrasi dengan jaringan produksi global dan ke arah Timur. Kebijakan luar negeri yang lebih kuat ini didorong oleh keyakinan bahwa pengaruh geostrategis adalah fungsi dari keberhasilan ekonomi yang dicapai oleh India dengan menjadikan strategi Act East sebagai instrument yang berbeda dari kebijakan Look East. Seiring dengan upaya India untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan negara-negara di Timurnya, India juga memperluas jangkauan ke arah “Timur” untuk bergerak melampaui Asia Tenggara dan menciptakan visi

strategis untuk Asia-Pasifik yang lebih luas. Hal ini menjadi perkembangan dari tujuan kebijakan Look East yang hanya sebatas berfokus pada hubungan dengan negara di Asia Tenggara. Meskipun tidak mengabaikan Asia Tenggara, pendekatan Act East diharapkan dapat menintensifkan keterlibatan strategis India dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk melibatkan dirinya di Kawasan Asia-Pasifik. Dalam hal ini, Act East dapat menjadi upaya untuk mengubah sejarah India yang memiliki cenderung tidak memandang Kawasan Asia-Pasifik. Dalam hal ini, Penggambaran geografis ini sangat penting karena visi Act East India mulai terbentuk pada saat China berusaha keras untuk “Melihat Ke Barat” melalui rencana konektivitas regional “One Belt, One Road”. Namun perlu dicatat juga bahwa China, Jepang, dan Australia tidak hanya merupakan aktor utama Asia-Pasifik tetapi juga anggota APEC dimana India juga merupakan anggotanya. Pada saat yang sama, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan China semakin menjadi lokasi besar diaspora India, komponen ekonomi, dan strategis penting dari kebijakan pemerintahan Modi.

Dari sisi strategis, Act East dipilih sebagai visi strategis India untuk Kawasan Asia-Pasifik melalui peran geostrategis yang lebih besar dengan bersikap proaktif di berbagai bidang dimana perannya sebelumnya terbatas. Hal ini bukan hanya meliputi bantuan kemanusiaan atau bantuan bencana tetapi juga meluas ke inisiatif keamanan maritim termasuk latihan Angkatan laut bersama. Dalam pidato Perdana Menteri Modi di Singapura pada 23 November 2015 dalam kunjungannya di Asia Tenggara, Modi mengatakan akan berfokus pada keterlibatan kuat pemerintahannya dengan Kawasan Asia-Pasifik, dengan menyebutkan secara spesifik ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan, Australia, Mongolia, dan Kepulauan Pasifik. Modi juga memuji Jepang sebagai negara yang telah memberikan kontribusi besar bagi modernisasi India dan sebagai mitra strategis di Kawasan Asia-Pasifik dan Samudera Hindia (MFA Statement, 2015). Modi menguraikan pentingnya India dalam keterlibatan ekonomi dengan ASEAN yang

mengacu pada hubungan politik, keamanan, dan pertahanan India yang mendalam dengan negara-negara ASEAN. Sejak pertama kali diluncurkan, strategi Act East dipandang akan menekankan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan. Hal ini menunjukkan India yang ingin menjadi aktor regional utama dengan pengaruh geostrategis. Namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan harapan India untuk memberikan momentum bagi pertumbuhan ekonomi regional karena fundamental ekonomi makro yang kuat dan kebijakan ekonomi yang diarahkan oleh Perdana menterinya langsung sementara harus mengimbangi pengaruh strategis China di Kawasan. Kedua faktor tersebut penting dalam menentukan keterlibatan proaktif India dengan kawasan yang mencakup dimensi ekonomi strategis.

Terdapat beberapa dimensi yang membentuk transformasi kebijakan India ke arah Asia-Pasifik. Pertama, peluncuran Kebijakan Act East India mencerminkan meningkatnya pengaruh India di dunia. Kekuatan India secara bertahap diakui sejak India berhasil mereformasi perekonomian dan persenjataan nuklirnya. Pada saat ini pemerintahan Modi telah membuat dorongan besar untuk memajukan status internasional India melalui *big power diplomacy*, yaitu mengamankan status kekuatan global dan memperkuat hubungannya dengan kekuatan besar lainnya. Pemerintahan Modi bertujuan untuk mengubah India dari negara dominan di Asia Selatan menjadi kekuatan baru di dunia (N. Burns, 2016).

Dinamikan kedua bagi India untuk mengejar kebijakan Asia-Pasifik yang lebih aktif adalah persepsinya terhadap kebangkitan China dan pengaruhnya di Kawasan Asia-Pasifik. Hubungan India-China telah mencapai titik terendah pada tahun 1962 ketika kedua negara tersebut berperang karena konflik sengketa perbatasan. Hingga saat ini, India menganggap bahwa China telah melampaui ekspektasi dengan kemunculannya sebagai negara adikuasa pada awal tahun 1990-an. Sengketa perbatasan menjadi gangguan utama dalam hubungan India-China. Beberapa isu lain seperti isu Tibet, dan juga ketidakseimbangan perdagangan juga

memicu ketidakpercayaan antara India dan China. Selain itu China juga menunjukkan pengaruhnya di Kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan daerah yang penting bagi India karena menjadi jalur perdagangan menuju ke arah Asia-pasifik. Dengan China yang bermain di Kawasan ini membuat India memperkuat keamanannya dengan membangun Pelabuhan Gwadar di Pakistan agar memudahkan mobilitas ke Samudera Hindia, India juga memperluas kehadiran Angkatan lautnya di wilayah Timur Laut China Selatan sebagai respons terhadap ambisi China terhadap Samudera Hindia dan yang terakhir India juga semakin mendorong Kerja sama dengan negara Kawasan Asia-Pasifik untuk mencari sekutu dalam melawan pengaruh China di Samudera Hindia (Rajendram, 2014).

2.3 Perkembangan dan Perubahan Antara Look East dan Act East

Sejak diluncurkannya kebijakan Act East pada tahun 2014, pemerintah India telah memproyeksikan kebijakan ini sebagai perpaduan antara hubungan diplomatik India, kemitraan ekonomi dan perdagangan, dan kolaborasi strategis dengan negara-negara Asia Tenggara dan Kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Sementara beberapa politikus India mengklaim Act East sebagai inisiatif yang sama sekali bukan hal baru, para kritikus melabeli kebijakan ini sebagai bentuk *rebranding* dari kebijakan Look East Policy yang tidak memiliki banyak hal baru untuk ditawarkan jadi mereka beranggapan bahwa fase dari Look East ke Act East ini tidak lain hanyalah *rebranding* dari keterlibatan India dengan Asia Tenggara. Dari kritik ini muncullah pertanyaan apakah kebijakan Act East ini merupakan kebijakan yang serupa dengan Look East? Apakah tidak ada perubahan substansi antara Look East dan Act East?

Secara spesifik untuk menjawab perbedaan antara kebijakan Look East dan Act East dapat dilihat dari focus kedua kebijakan ini. Kebijakan Look East berfokus pada hubungan India dengan ASEAN dan juga integrasi ekonomi. Pada implementasinya ketika kebijakan Look East

dikeluarkan, India menjadi partner dialog ASEAN pada tahun 1996 dan mitra tingkat puncak pada tahun 2002. Pada tahun 2012 hubungan kerja sama ini meningkat menjadi hubungan kerja sama strategis dengan India yang juga menjadi peserta aktif dalam beberapa forum regional seperti East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum, dan sebagainya. Sementara itu kebijakan Act East berfokus pada hubungan Kerja sama dengan negara ASEAN, integrasi ekonomi, negara Asia Timur, dan Kerja sama keamanan. Keamanan merupakan dimensi yang penting dari kebijakan Act East. Dalam konteks meningkatnya pengaruh Cina di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, mengamankan kebebasan navigasi dan peran India sendiri di Samudra Hindia adalah fokus utama dari Kebijakan Act East. Oleh karena itu, India telah terlibat di bawah narasi pengelompokan Indo-Pasifik dan informal yang disebut Quadrilateral Security Dialogue (QUAD).

India juga telah mewaspadai aktivitas China di Kawasan Samudera Hindia. China merupakan ancaman bagi India di Samudera Hindia. Istilah atau konsep Indo-Pasifik digunakan untuk melawan pengaruh China di Laut China Selatan dan Samudera Hindia. Pada awalnya istilah Indo-Pasifik digunakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007. Menurut Abe istilah ini merupakan hubungan atau koneksi antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selanjutnya Presiden Amerika Serikat menghidupkan Kembali istilah Indo-Pasifik dalam KTT EAS 2017 dengan AS membayangkan sistem Indo-Pasifik yang terbuka, bebas, inklusif, sejahtera, dan berbasis aturan. Sehingga istilah Indo-Pasifik ini menunjukkan arti penting bagi India dalam sebuah konstruksi kebijakan baru. Hal ini tercermin dalam latihan militer multilateral seperti *exercise Malabar* (latihan militer trilateral Angkatan laut antara India, Jepang, dan Amerika Serikat). Selain itu India juga menjadi tuan rumah latihan militer ASEAN plus pada tahun 2018.

2.4 Dampak dan Tantangan Act East

Implementasi kebijakan Act East ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap hubungan India dengan China mengingat India berusaha melawan hegemoni China di Kawasan Asia-Pasifik serta Samudera Hindia melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi dan militer dengan negara anggota ASEAN dan Asia Timur. Dikarenakan kepentingan China yang semakin besar di Asia Timur, hubungan antara India dan ASEAN dapat membantu India memberikan tekanan balik kepada China. Sebagai contoh, latihan Angkatan laut India, kunjungan pelabuhan, dan dialog keamanan maritim dengan negara-negara pesisir di Laut China Selatan berfungsi untuk mengingatkan China tentang kemampuan India untuk melawan China di Kawasan tersebut.

Selain ketegangan dengan China yang diakibatkan oleh implementasi kebijakan Act East, Kebijakan ini juga membuat orang berargumentasi bahwa cakupan geografis yang diperluas dalam kebijakan tersebut sudah terlihat selama kebijakan Look East dikeluarkan. Terlepas dari klaim bahwa hubungan India-Jepang telah memperoleh peningkatan secara signifikan di bawah kebijakan Act East, India telah mempercepat interaksi ekonomi, politik dan strategis dengan Jepang selama fase awal kebijakan Look East dibuktikan dengan India yang sudah menjadi mitra strategis bagi negara Asia Timur dan Tenggara semenjak tahun 2006. Hal ini tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan terhadap implikasi yang dihasilkan oleh kebijakan Act East (Lee, 2015). Selanjutnya meskipun adanya klaim bahwa hubungan India dengan Kawasan Asia Tenggara dan Timur telah mencapai puncaknya di bawah kebijakan Act East, India tetap mempertahankan reputasi sebagai kekuatan utama kawasan yang tidak begitu berpengaruh di Asia Timur dan Tenggara. Di bidang ekonomi, terlepas dari klaim mengejar hubungan yang lebih berintegrasi secara ekonomi dengan Kawasan, pada tahun 2015 India masih merupakan mitra dagang terbesar kesembilan di ASEAN dengan beberapa negara dengan ekonomi yang jauh lebih kecil justru memiliki tingkat perdagangan yang lebih tinggi

dengan ASEAN seperti Taiwan dan Hongkong. India belum cukup berintegrasi ke dalam rantai pasokan manufaktur Kawasan meskipun pada tahun 2015 ASEAN memfasilitasi penguatan hubungan ekonomi India dengan Kawasan, terutama mengingat bahwa India mempertahankan keunggulan komparatif dalam industri berorientasi jasa (Bakshi & Tayal, 2015). Rendahnya hasil Kerja sama dengan ASEAN disebabkan karena kebijakan Act East bergantung pada kondisi internal reformasi ekonomi yang akan menentukan langkah dimana India lebih lanjut berintegrasi dengan ekonomi Asia Timur. Meskipun pemerintah Modi memproyeksikan citra yang lebih ramah investor, secara historis kebijakan ekonomi proteksionis dan konservatif India tetap mengakar kuat. Permasalahan birokrasi dan koordinasi antar kementerian terkait dengan kemitraan publik-swasta dan pembiayaan menjadi hambatan untuk mempercepat konektivitas infrastruktur.

Selanjutnya, kebijakan Act East juga makin diperluas sampai dengan isi kebijakan yang lebih tegas oleh kekuatan regional lainnya. Mengadopsi geografi strategis yang semakin luas yang mencakup Kawasan Samudera Hindia hingga Pasifik menimbulkan potensi risiko terhadap kebijakan Act East karena menjadi terlalu luas dan mencakup semua tanpa focus geografis dan strategis yang jelas. Hal ini dapat melemahkan prinsip sentralitas ASEAN yang menjadi landasan kebijakan Act East. Partisipasi India dalam Kerja sama trilateral dengan Jepang dan Singapura, termasuk juga QUAD yang beranggotakan empat negara non-ASEAN yang semakin meningkat membuat kebijakan Act East India ini secara bertahap melampaui ASEAN. Sebagai contoh dialog tingkat Menteri trilateral antara India, Jepang dan AS yang ditingkatkan ke tingkat Menteri luar negeri pada September 2015, dialog trilateral tingkat Menteri Luar Negeri Pedana antara Australia, India, dan Jepang pada Juni 2015, Dialog trilateral India, Australia dan Indonesia di Samudera Hindia, Dialog tingkat II antara India, Jepang, dan Korea Selatan serta perjanjian trilateral antara India, Jepang dan Vietnam pada Desember 2015 membuat kebijakan Act East memiliki kecenderungan yang lebih luas oleh

kekuatan regional untuk tidak lagi memfokuskan keamanan mereka ke ASEAN (Parameswaran, 2015). Dengan demikian masih belum ada bentuk nyata yang menandakan fase baru dari kebijakan Look East India ini selain namanya diubah menjadi kebijakan Act East. Elemen fundamental dari kebijakan Act East yang meliputi geografi strategis yang lebih luas yang mencakup negara-negara seperti Jepang dan Australia dan pendektannya yang berorientasi pada pembangunan sudah terbukti selama periode awal keterlibatan India ke arah timur. Selain itu perluasan geografi strategis kebijakan untuk merangkul Kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas telah menimbulkan tantangan dan ambiguitas di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menjadi terlalu luas sementara melemahkan fokus kebijakan pada sentralitas ASEAN. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa perubahan kata dari melihat menjadi bertindak ke timur ini hanya sebatas retorika atau hanya upaya rebranding sehingga konsep Act East ini masih perlu didefinisikan dengan jelas.

2.5 Kesimpulan

Didorong oleh runtuhnya Uni Soviet menciptakan kekosongan strategis dan ekonomi bagi India, dan berakhirnya bipolaritas Amerika Serikat-Uni Soviet akibat berakhirnya perang dingin yang berdampak pada mengurangnya relevansi sikap non-blok India, kemudian munculnya China sebagai kekuatan baru yang mendorong India untuk menjangkau Asia Tenggara untuk menghindari hegemoni China sehingga India berusaha lebih aktif dalam melancarkan kegiatan politik dan ekonominya, serta keinginan untuk mengembangkan dan menstabilkan negara-negara bagian timur lautnya yang cenderung rapuh karena beberapa konflik dan pemberontakan yang terjadi membuat India membuka diri ke pasar dunia dan mengikuti tren regionalisme dengan meluncurkan kebijakan Look East pada tahun 1991. Kebijakan Look East telah melampaui tujuan awal India yang ingin memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pertumbuhan Asia Timur dan Tenggara. Dengan pertumbuhan ekonomi India yang berkelanjutan, kebijakan tersebut sekarang memiliki agenda yang jauh lebih luas.

Ketika kebijakan Look East diimplementasikan, empat tujuan besar telah dicapai dalam beberapa tahun sejak dimulai meliputi integrasi ekonomi regional, reformasi dan liberalisasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan di wilayah timur laut.

Selanjutnya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan peningkatan kebijakan Look East menjadi Act East pada pertemuan puncak India-ASEAN di Myanmar pada November 2014. Act East didefinisikan oleh Modi sebagai tindakan India menjalin kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dan Timur seperti negara Anggota ASEAN dengan tujuan melawan hegemoni Tiongkok di wilayah Asia-Pasifik dan Samudra Hindia. India memiliki kepentingan di wilayah Samudra Hindia sehingga India berusaha menjadi peran penting di Wilayah Asia Tenggara dan Timur untuk melawan Hegemoni Tiongkok salah satunya dengan ikut intervensi dalam sengketa Laut China Selatan. Secara spesifik antara kebijakan Look East dan Act East dapat dilihat dari fokus kedua kebijakan ini. Kebijakan Look East berfokus pada hubungan India dengan ASEAN dan juga integrasi ekonomi. Sementara itu kebijakan Act East berfokus pada hubungan Kerja sama dengan negara ASEAN, integrasi ekonomi, negara Asia Timur, dan Kerja sama keamanan. Keamanan merupakan dimensi yang penting dari kebijakan Act East. Dalam konteks meningkatnya pengaruh Cina di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, mengamankan kebebasan navigasi dan peran India sendiri di Samudra Hindia adalah fokus utama dari Kebijakan Act East.